DIGITAL AGE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN SATU DATA DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. Giffard Nouvandi Faddullah
NPP. 33.0231
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email:

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Andi Masrich, M.Si
Email: andimasrich@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This study is motivated by the suboptimal implementation of the One Data policy in Palembang City despite the city's high Electronic-Based Government System (SPBE) performance. This condition indicates a gap between the government's digital performance and the availability as well as integration of data across government agencies. As a result, the utilization of data in evidence-based policymaking has not yet been fully effective.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of Digital Age Governance in the administration of the One Data program in Palembang City.* ***Method:*** *This study employs a qualitative approach within a constructivist paradigm. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles et al. (2014) interactive model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The findings indicate that the implementation of Digital Age Governance in the One Data program in Palembang City has involved various stakeholders, including the Department of Communication and Informatics (Diskominfo), the Regional Development Planning Agency (Bappeda), Statistics Indonesia (BPS), the Civil Registration Office (Disdukcapil), and other local government agencies through inter-agency coordination and information system integration. However, its implementation has not been fully optimized due to differences in data standards, inconsistencies in data collection methods, delays in data reporting, limited system integration, and uneven human resource capacities.* ***Conclusion:*** *Digital Age Governance in the implementation of the One Data program in Palembang City has not yet been optimally implemented. Therefore, efforts are needed to strengthen inter-agency coordination, standardize data management, enhance information systems, and improve the capacity of government personnel.*

Keywords: *Digital Age Governance, Digital Government, One Data, Palembang City, SPBE.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan kebijakan Satu Data di Kota Palembang meskipun capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tergolong tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kinerja digital pemerintah dengan ketersediaan serta keterpaduan data antarinstansi. Permasalahan ini berdampak pada belum efektifnya pemanfaatan data dalam perumusan kebijakan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *Digital Age Governance* dalam penyelenggaraan Satu Data di Kota Palembang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles et al. (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Digital Age Governance* dalam program Satu Data di Kota Palembang telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Diskominfo, Bappeda, BPS, Disdukcapil, dan OPD lainnya melalui koordinasi antarinstansi dan integrasi sistem informasi. Namun, implementasinya belum optimal karena adanya perbedaan standar data, ketidaksinkronan metode pengumpulan, keterlambatan pelaporan, keterbatasan integrasi sistem, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum merata. **Kesimpulan:** *Digital Age Governance* dalam penyelenggaraan program Satu Data Kota Pelmbang belum berjalan optimal. Sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan koordinasi, standarisasi data, penguatan sistem informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur.

Kata Kunci: *Digital Age Governance*, Kota Palembang, Pemerintahan Digital, Satu Data, SPBE.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan era digital telah mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data (Daraba, 2019; Ravšelj et al., 2022). Dalam mendukung transformasi tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan Satu Data Indonesia bertujuan mewujudkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan. Implementasi kebijakan ini menjadi semakin penting karena kualitas tata kelola pemerintahan digital sangat ditentukan oleh ketersediaan dan integrasi data antarinstansi.

Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan perkembangan positif dalam transformasi digital pemerintahan. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh penghargaan CNN Indonesia Awards kategori *Outstanding Digital Innovation for Governance Sustainability* sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Selain itu, hasil Evaluasi SPBE tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Palembang memperoleh indeks SPBE sebesar 3,51 dengan predikat “Sangat Baik”, menempatkannya sebagai salah satu pemerintah

daerah dengan capaian digitalisasi terbaik di Sumatera Selatan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kota Palembang telah berhasil mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik digital secara cukup baik.

Namun demikian, capaian indeks SPBE yang tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Berdasarkan hasil observasi pada portal resmi Satu Data Kota Palembang, jumlah dataset yang tersedia hanya sekitar 36 dataset dari 52 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, pada portal data milik Bappeda Kota Palembang tersedia lebih dari 150 dataset. Perbedaan jumlah dataset yang cukup signifikan antara dua platform resmi pemerintah daerah tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam pengelolaan, integrasi, dan pemutakhiran data. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses koordinasi antarprodusen data, penerapan standar data, serta mekanisme berbagi pakai data belum berjalan secara optimal.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keberhasilan implementasi SPBE dan kualitas penerapan kebijakan Satu Data Indonesia. Secara konseptual, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur melalui keberadaan sistem elektronik, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah mengintegrasikan data secara lintas sektor, menyediakan data yang lengkap dan mutakhir, serta menjamin keterbukaan informasi publik (Dunleavy & Margetts, 2023; Hanisch et al., 2023). Kenyataannya, keterbatasan jumlah dataset pada portal Satu Data Kota Palembang menunjukkan bahwa prinsip keterpaduan, interoperabilitas, dan keterbukaan data masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Satu Data Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Ridho & Jaelani (2025) menemukan bahwa koordinasi antar-OPD masih bersifat formal dan belum efektif. Penelitian Setiyawan et al. (2025) menegaskan pentingnya komitmen serta koordinasi lintas lembaga dalam penyelenggaraan Satu Data. Sementara itu, Anisa et al. (2023) menemukan bahwa rendahnya koordinasi dan keterbatasan infrastruktur digital menyebabkan integrasi data antarinstansi belum berjalan optimal. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Satu Data tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola, koordinasi kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kota Palembang menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Meskipun memiliki capaian SPBE yang tinggi dan memperoleh berbagai penghargaan di bidang digitalisasi pemerintahan, masih terdapat permasalahan terkait keterbukaan, integrasi, dan ketersediaan data. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis *Digital Age Governance* dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Palembang serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya.

1.2. Kesenjangan Penelitian yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan Satu Data Indonesia dalam perspektif *Digital Age Governance* di berbagai daerah di Indonesia. Secara empiris, implementasi kebijakan Satu Data masih menghadapi berbagai permasalahan meskipun pemerintah telah mengembangkan

berbagai regulasi dan sistem digital untuk mendukung integrasi data pemerintahan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tujuan mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dibagipakaikan antarinstansi belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Satu Data masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan tata kelola data pemerintah belum berjalan secara optimal.

Selain itu, kondisi di berbagai daerah menunjukkan pola permasalahan yang relatif seragam, yaitu lemahnya koordinasi antarinstansi, belum optimalnya integrasi data, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya komitmen dan pemahaman aktor terhadap pentingnya tata kelola data. Di Kabupaten Kulon Progo misalnya, tata kelola antar-OPD masih bersifat formalitas dan menghadapi kendala dalam pembaruan serta integrasi data. Di Kota Salatiga, implementasi Satu Data terkendala oleh komunikasi yang kurang efektif dan rendahnya pemahaman aparatur terhadap manfaat kebijakan. Sementara itu, penelitian pada tingkat nasional menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Satu Data sangat bergantung pada komitmen kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan pemerintah dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran data juga ditemukan sebagai faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada implementasi Satu Data di tingkat nasional, provinsi, atau daerah dengan karakteristik birokrasi yang relatif berbeda. Sebagian besar penelitian menyoroti faktor-faktor implementasi secara parsial seperti koordinasi, komitmen kelembagaan, sumber daya manusia, dan integrasi data. Namun, masih terbatas penelitian yang mengkaji penyelenggaraan Satu Data secara komprehensif dalam perspektif *Digital Age Governance* pada konteks kota metropolitan yang memiliki kompleksitas birokrasi, jumlah aktor yang lebih banyak, serta kebutuhan integrasi data yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa masih terbatasnya kajian mengenai penyelenggaraan Satu Data dalam perspektif *Digital Age Governance* pada pemerintah daerah dengan karakteristik kota metropolitan, khususnya Kota Palembang. Padahal, Kota Palembang memiliki capaian SPBE yang tinggi dengan predikat "Sangat Baik", tetapi masih menunjukkan adanya permasalahan dalam ketersediaan dan integrasi dataset pada portal Satu Data. Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip *Digital Age Governance* diterapkan dalam penyelenggaraan Satu Data di Kota Palembang, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data.

1.3. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara capaian transformasi digital pemerintahan dengan kondisi implementasi kebijakan Satu Data di lapangan. Meskipun Kota Palembang memperoleh predikat "Sangat Baik" dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 dengan indeks 3,51, kenyataannya ketersediaan data pada Portal

Satu Data Kota Palembang masih relatif terbatas. Portal Satu Data hanya menampilkan sekitar 36 dataset dari 52 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sedangkan pada portal data Bappeda tersedia lebih dari 150 dataset. Perbedaan tersebut mengindikasikan masih adanya permasalahan dalam integrasi data, sinkronisasi informasi, koordinasi antarprodusen data, serta konsistensi penerapan standar data di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SPBE belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini penting sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Satu Data. Hasil penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan koordinasi antarinstansi, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, dan integrasi data lintas sektor. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam memperkuat tata kelola data pemerintahan berbasis *Digital Age Governance* sehingga penyelenggaraan Satu Data di Kota Palembang dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, transparan, dan mampu mendukung pengambilan keputusan pembangunan daerah secara lebih efektif.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh sejumlah penelitian terdahulu yang relevan mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia dalam perspektif *Digital Age Governance*. Secara umum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Satu Data telah mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, namun masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek koordinasi antarinstansi, integrasi data, kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen lembaga dalam mendukung keterpaduan data pemerintah.

Penelitian Ridho & Jaelani (2025) menunjukkan bahwa tata kelola data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih bersifat formalitas dan belum berjalan secara optimal. Penelitian tersebut menemukan adanya kendala dalam pembaruan data, integrasi antarinstansi, serta koordinasi yang belum efektif sehingga menghambat terwujudnya tata kelola data yang terpadu. Selanjutnya, penelitian Setiyawan et al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Satu Data sangat dipengaruhi oleh komitmen antar lembaga, kejelasan pembagian peran, serta mekanisme koordinasi lintas sektor. Penelitian tersebut menegaskan bahwa aspek kelembagaan menjadi faktor penting dalam mendukung integrasi data pemerintah secara nasional.

Penelitian Anisa et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi Satu Data masih terkendala oleh lemahnya komunikasi antaraktor serta rendahnya pemahaman aparatur terhadap manfaat kebijakan tersebut. Akibatnya, koordinasi dan pemanfaatan data lintas sektor belum berjalan secara efektif. Sementara itu, penelitian Susniwati & Zamili (2022) menegaskan bahwa percepatan implementasi Satu Data memerlukan mekanisme koordinasi yang kuat, komitmen bersama antarinstansi, serta dukungan tata kelola digital yang terintegrasi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan aktor pemerintah dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan.

Terakhir, penelitian Nuryana & Junaidi (2025) menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan Satu Data masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya tata kelola data, serta belum optimalnya kapasitas pengelolaan data di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dalam perspektif *Digital Age Governance* telah menunjukkan perkembangan positif dalam mendorong integrasi dan pemanfaatan data pemerintahan. Namun demikian, berbagai penelitian masih menemukan permasalahan yang relatif serupa, yaitu lemahnya koordinasi antarinstansi, belum optimalnya integrasi data, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya komitmen dan pemahaman aktor pelaksana terhadap pentingnya tata kelola data. Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, atau daerah dengan karakteristik birokrasi yang berbeda dengan Kota Palembang. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji penyelenggaraan Satu Data di Kota Palembang sebagai kota metropolitan yang memiliki kompleksitas tata kelola data dan kebutuhan integrasi digital yang lebih tinggi, sehingga dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian *Digital Age Governance* pada tingkat pemerintah daerah.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan analisis penyelenggaraan Satu Data Indonesia dalam konteks kota metropolitan yang memiliki kompleksitas tata kelola pemerintahan dan kebutuhan integrasi data yang tinggi. Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan telah memperoleh predikat “Sangat Baik” dalam evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), namun masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi Satu Data, khususnya terkait keterbatasan jumlah dataset, integrasi data antar-OPD, serta sinkronisasi informasi antarplatform pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadikan penelitian ini tidak hanya berfokus pada keberadaan teknologi dan sistem digital, tetapi juga pada bagaimana tata kelola data dijalankan dalam lingkungan birokrasi yang kompleks, melibatkan banyak aktor, serta menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor, kapasitas sumber daya manusia, dan konsistensi penerapan standar data.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada implementasi Satu Data di tingkat nasional, provinsi, atau daerah dengan karakteristik birokrasi yang lebih sederhana. Sebagian besar penelitian sebelumnya menyoroti aspek tertentu seperti koordinasi kelembagaan, komitmen organisasi, integrasi data, atau kapasitas sumber daya manusia secara parsial. Sementara itu, penelitian ini menekankan analisis penyelenggaraan Satu Data secara lebih menyeluruh melalui perspektif *Digital Age Governance* untuk melihat bagaimana transformasi tata kelola digital dijalankan dalam konteks pemerintah daerah metropolitan yang memiliki tuntutan integrasi data dan pelayanan publik yang lebih kompleks. Dari sisi teori, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan

teori *Digital Age Governance* yang dikemukakan oleh Şahnagil (2022), yang terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu *Reintegration*, *Needs-based holism*, dan *Digitalization*.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *Digital Age Governance* dalam penyelenggaraan Satu Data di Kota Palembang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis untuk menganalisis penyelenggaraan Satu Data di Kota Palembang dalam perspektif *Digital Age Governance*. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam proses, dinamika, serta makna yang dibangun oleh para aktor dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Nurdin & Hartati, 2018). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Satu Data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan pelaksanaan Satu Data, regulasi, portal data pemerintah, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan memilih pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan Satu Data di Kota Palembang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi (Simangunsong, 2017). Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan teori *Digital Age Governance* dari Şahnagil (2022) yang mencakup tiga dimensi, yaitu *Reintegration*, *Needs-based holism*, dan *Digitalization* untuk menganalisis penyelenggaraan Satu Data di Kota Palembang secara komprehensif.

Penelitian dilaksanakan di Kota Palembang dengan fokus pada instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan Satu Data, terutama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sebagai walidata daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama 20 hari, yaitu pada tanggal 5–24 Januari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis penyelenggaraan Satu Data Kota Palembang menggunakan teori *Digital Age Governance* yang dikemukakan oleh Şahnagil (2022). Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital dilaksanakan melalui integrasi kelembagaan, orientasi pelayanan yang berfokus pada kebutuhan pengguna, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data dan pelayanan publik. *Digital Age Governance* terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu *reintegration*, *needs-based holism*, dan *digitalization*. Adapun pembahasan masing-masing dimensi akan disajikan sebagai berikut.

3.1. *Reintegration*

Pada dimensi *reintegration* dalam implementasi Satu Data Kota Palembang, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyatuan kembali fungsi-fungsi pemerintahan telah dilakukan melalui koordinasi antarinstansi, integrasi sistem informasi, dan kerja sama lintas sektor. Keterlibatan Diskominfo sebagai walidata, Bappeda, BPS, Disdukcapil, serta berbagai OPD sebagai produsen data menunjukkan adanya mekanisme kolaboratif dalam mendukung pengelolaan data yang terintegrasi. Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala berupa perbedaan format data, metode pengumpulan yang belum seragam, serta keterlambatan penyampaian data dari beberapa OPD.

Pada indikator koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan dan pertukaran data, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dilaksanakan melalui forum Satu Data dan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh OPD sebagai produsen data. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang menyatakan bahwa "Diskominfo berperan sebagai walidata yang mengoordinasikan seluruh data dari OPD sebelum masuk ke portal Satu Data, termasuk melakukan verifikasi dan standarisasi data." Sementara itu, staf teknis OPD menjelaskan bahwa "koordinasi dilakukan melalui forum Satu Data dan juga komunikasi teknis antar OPD." Temuan ini menunjukkan bahwa koordinasi telah berlangsung secara berjenjang dan berkelanjutan untuk menyelaraskan definisi, metode pengumpulan, serta format pelaporan data. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa perbedaan format data antar-OPD, perbedaan metode pengumpulan data, serta keterlambatan pengiriman data sebagaimana disampaikan oleh Diskominfo, Bappeda, dan pengelola data OPD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan standar data dan komitmen antarinstansi agar integrasi data dapat berlangsung lebih optimal.

Pada indikator integrasi sistem informasi antar lembaga pemerintah, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah mengembangkan portal Satu Data sebagai sistem terpusat untuk mengintegrasikan data dari berbagai perangkat daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang menjelaskan bahwa "semua data dari OPD dikumpulkan di satu sistem, kemudian diverifikasi dan distandarisasi sebelum dipublikasikan melalui portal Satu Data." Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang juga menyatakan bahwa "data kependudukan menjadi basis data bagi OPD lain dalam pelayanan publik sehingga harus terintegrasi dengan sistem yang ada." Selain itu, perwakilan BPS Kota Palembang menegaskan bahwa integrasi data harus memperhatikan kesesuaian dengan standar statistik nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi telah berjalan melalui tahapan pengumpulan, verifikasi, standarisasi, integrasi, dan publikasi data dalam satu platform. Keberadaan sistem terpusat tersebut mendukung efisiensi pengelolaan data, transparansi informasi, serta pengambilan kebijakan berbasis data, meskipun masih diperlukan penguatan infrastruktur teknologi, standarisasi sistem, dan kapasitas sumber daya manusia agar integrasi dapat berjalan lebih optimal.

Pada indikator mekanisme kerja sama lintas sektor dalam penyelenggaraan Satu Data, hasil penelitian menunjukkan adanya kolaborasi antara Diskominfo, Bappeda, BPS, dan OPD dalam

setiap tahapan penyelenggaraan Satu Data, mulai dari identifikasi kebutuhan data, penyusunan standar data, produksi data, verifikasi dan validasi, integrasi data, hingga pemanfaatan dan evaluasi data. Perwakilan BPS Kota Palembang menyampaikan bahwa "BPS memberikan standar data dan metodologi agar data yang dihasilkan OPD sesuai dengan standar statistik nasional." Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Palembang menyatakan bahwa "data dari BPS dan OPD digunakan bersama dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD." Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang juga menegaskan bahwa "kerja sama lintas sektor dilakukan untuk memastikan data yang dihasilkan dapat digunakan secara bersama oleh semua instansi." Temuan ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor telah membentuk pola tata kelola data yang kolaboratif dengan pembagian peran yang jelas antara pembina data, walidata, dan produsen data. Namun demikian, kerja sama yang terjalin masih lebih banyak dilakukan melalui koordinasi dan pembinaan teknis dibandingkan melalui perjanjian kerja sama formal, sehingga masih diperlukan penguatan aspek kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan kolaborasi antarinstansi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dimensi *reintegration* dalam implementasi Satu Data Kota Palembang telah menunjukkan adanya upaya integrasi fungsi pemerintahan melalui koordinasi antarinstansi, integrasi sistem informasi, dan kerja sama lintas sektor yang relatif berjalan dengan baik. Keterlibatan berbagai aktor dalam pengelolaan data telah mendukung terciptanya tata kelola data yang lebih terpadu dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa belum seragamnya standar data, perbedaan metode pengumpulan data, keterlambatan penyampaian data, serta belum optimalnya formalisasi kerja sama antarinstansi. Dalam perspektif *Digital Age Governance*, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *reintegration* telah mulai terwujud melalui penyatuan kembali fungsi-fungsi pemerintahan yang sebelumnya terfragmentasi, meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi, interoperabilitas sistem, dan kapasitas kelembagaan agar integrasi data dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3.2. *Needs-based holism*

Pada dimensi *needs-based holism* dalam implementasi Satu Data Kota Palembang, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan tata kelola data telah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat melalui penyediaan data yang relevan, penyederhanaan proses birokrasi, serta peningkatan efisiensi layanan publik berbasis data terintegrasi. Implementasi Satu Data dilakukan dengan menyesuaikan jenis data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, memperkuat sistem data terpusat, serta mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital. Meskipun demikian, optimalisasi pemanfaatan data masih memerlukan peningkatan kualitas data dan pemerataan digitalisasi layanan pada seluruh sektor pemerintahan.

Pada indikator penyesuaian kebijakan Satu Data dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan data dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah serta kebutuhan informasi masyarakat.

Kepala Bappeda Kota Palembang menyatakan bahwa “data yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan sehingga OPD harus menyesuaikan jenis data yang dikumpulkan.” Temuan ini diperkuat oleh data sekunder yang menunjukkan bahwa Portal Satu Data Kota Palembang telah menyediakan berbagai dataset dari beragam sektor strategis pembangunan. Hal ini sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Sebaran Dataset OPD Kota Palembang

No	Jenis Data	Jumlah Dataset
1	Data Dinas Kominfo	2
2	Data RSUD BARI Palembang	9
3	Data Pendidikan	2
4	Data Kesehatan	0
5	Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat	3
6	Data Dinas Pengendalian Penduduk	3
7	Data Dinas Pemadam Kebakaran	2
8	Data Dinas Perikanan	2
9	Data Sekretariat DPRD	7
10	Data Dinas Lingkungan Hidup	2
11	Data Dinas Kebudayaan	5

Sumber: Portal Satu Data, 2026

Berdasarkan data yang disajikan, dijelaskan bahwa sektor RSUD BARI Palembang memiliki jumlah dataset terbesar yaitu sebanyak 9 dataset, diikuti Sekretariat DPRD sebanyak 7 dataset, Dinas Kebudayaan sebanyak 5 dataset, serta beberapa OPD lain yang menyediakan data pada sektor pendidikan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, perikanan, dan pemadam kebakaran. Keberagaman dataset tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Satu Data telah disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kebutuhan informasi publik. Salah satu contoh pemanfaatannya terlihat pada data anak tidak bersekolah yang digunakan sebagai dasar penyusunan program bantuan pendidikan dan intervensi peningkatan akses pendidikan. Perwakilan BPS Kota Palembang juga menyampaikan bahwa “penentuan jenis data yang disediakan harus mengacu pada kebutuhan pengguna data, baik pemerintah maupun masyarakat.” Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan Satu Data telah dirancang secara adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna data, meskipun masih terdapat beberapa sektor yang jumlah datasetnya relatif terbatas sehingga perlu terus dikembangkan agar kebutuhan informasi publik dapat terpenuhi secara lebih merata.

Pada indikator penyederhanaan proses birokrasi melalui sistem data terpusat, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Satu Data telah membantu mengurangi kompleksitas birokrasi dalam pengelolaan dan pertukaran data antarinstansi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang menyatakan bahwa “dengan adanya sistem Satu Data, proses pengelolaan data menjadi lebih terpusat sehingga mempermudah koordinasi antar OPD.” Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang juga menjelaskan bahwa “data kependudukan yang sudah terintegrasi memudahkan OPD lain dalam mengakses data tanpa harus melakukan permintaan

secara manual." Temuan tersebut diperkuat oleh data sekunder yang menunjukkan bahwa sistem Satu Data telah mengintegrasikan 42 dataset yang berasal dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu, Pemerintah Kota Palembang juga telah mengembangkan Mall Pelayanan Publik yang menyediakan 30 jenis layanan dengan keterlibatan 25 instansi pelayanan. Transformasi birokrasi berbasis digital juga telah diterapkan pada 18 kecamatan melalui pelayanan administrasi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertukaran data dan pelayanan publik tidak lagi dilakukan secara terpisah pada masing-masing instansi, tetapi melalui mekanisme yang lebih terintegrasi dan efisien. Staf teknis OPD turut menyampaikan bahwa sistem yang terpusat membuat proses pengolahan data menjadi lebih mudah karena tidak perlu lagi mengumpulkan data dari berbagai sumber secara terpisah. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem data terpusat telah berkontribusi dalam memangkas tahapan administrasi, mempercepat koordinasi antarinstansi, serta mendukung reformasi birokrasi berbasis digital.

Pada indikator efisiensi layanan publik berbasis data yang terintegrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi data memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas dan kecepatan layanan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang menyatakan bahwa "data yang terintegrasi membantu instansi dalam memberikan layanan yang lebih cepat karena informasi yang dibutuhkan sudah tersedia." Kepala Bappeda Kota Palembang menambahkan bahwa "data yang terintegrasi memudahkan dalam pengambilan keputusan sehingga program yang dijalankan menjadi lebih efektif." Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang menjelaskan bahwa pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi membantu mempercepat pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Temuan tersebut diperkuat oleh data sekunder yang menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang telah menyediakan 24 layanan administrasi kependudukan berbasis daring yang mencakup layanan KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan berbagai dokumen administrasi lainnya. Selain itu, integrasi 30 instansi pelayanan dalam Mall Pelayanan Publik menunjukkan bahwa masyarakat dapat memperoleh berbagai jenis layanan dalam satu sistem pelayanan terpadu (*one stop service*). Kondisi tersebut memungkinkan pengurangan waktu pelayanan, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta peningkatan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang juga menyatakan bahwa "masyarakat mulai merasakan kemudahan dalam mengakses layanan karena data sudah terintegrasi dalam sistem." Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi data tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan administratif, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dimensi *needs-based holism* dalam implementasi Satu Data Kota Palembang telah menunjukkan orientasi yang kuat pada kebutuhan pengguna data melalui penyediaan dataset yang beragam, integrasi 42 dataset dari 30 OPD, pengembangan 30 layanan pada Mall Pelayanan Publik yang melibatkan 25 instansi, serta penyediaan 24 layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Temuan tersebut menunjukkan

bahwa implementasi Satu Data telah mendukung penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam perspektif *Digital Age Governance*, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *needs-based holism* telah diimplementasikan melalui penyatuan layanan dan pengelolaan data yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, meskipun masih diperlukan perluasan cakupan data dan penguatan integrasi layanan digital agar manfaat yang dihasilkan dapat lebih optimal dan merata.

3.3. *Digitalization*

Pada dimensi *digitalization* dalam implementasi Satu Data Kota Palembang, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital telah diterapkan dalam pengelolaan data pemerintahan melalui penggunaan sistem informasi, aplikasi, website, serta portal data terintegrasi. Digitalisasi tersebut didukung oleh ketersediaan infrastruktur teknologi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik melalui platform digital.

Pada indikator pemanfaatan teknologi digital dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan data dalam Satu Data Kota Palembang telah dilakukan secara berbasis digital, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga publikasi data. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang menyampaikan bahwa “pengelolaan data dalam Satu Data sudah menggunakan sistem digital, mulai dari pengumpulan hingga publikasi melalui portal” (Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang). Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan bahwa “pengumpulan data kependudukan sudah berbasis sistem digital sehingga memudahkan dalam pengolahan dan pembaruan data” (Kepala Disdukcapil Kota Palembang). Dari sisi operasional, staf teknis OPD menyatakan bahwa “pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi dan sistem yang sudah terkomputerisasi sehingga mempermudah dalam penginputan dan pengolahan data” (Staf Teknis OPD).

Temuan tersebut diperkuat oleh data sekunder yang menunjukkan adanya berbagai inovasi aplikasi dan website pemerintah daerah, seperti Hallo Palembang yang dikelola Diskominfo, SICANTIK Keting Musi oleh Dinas Kesehatan, dan SITA oleh DPMPTSP yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital. Selain itu, Portal Satu Data Kota Palembang pada tahun 2025 telah mengintegrasikan 42 dataset dari berbagai sektor pemerintahan. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi instrumen utama dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sehingga mendukung efisiensi kerja birokrasi serta mempercepat penyediaan informasi bagi pemerintah maupun masyarakat.

Pada indikator kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah memiliki dukungan infrastruktur digital yang relatif memadai untuk mendukung implementasi Satu Data. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang menyampaikan bahwa “infrastruktur teknologi informasi sudah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Satu Data, termasuk server dan jaringan” (Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang). Kepala Disdukcapil Kota Palembang juga menegaskan bahwa “sistem

yang digunakan sudah berbasis digital, namun tetap membutuhkan dukungan infrastruktur yang stabil agar dapat berjalan optimal" (Kepala Disdukcapil Kota Palembang).

Temuan tersebut didukung oleh data sekunder yang menunjukkan bahwa 100% OPD telah terhubung dengan jaringan E-Government, didukung kecepatan jaringan sebesar 300 Mbps, keberadaan 1 Command Center, 1 Data Center, serta 880 menara telekomunikasi yang mendukung konektivitas digital di Kota Palembang. Selain itu, pemerintah daerah telah menyediakan 1 Portal Satu Data dan 1 Portal PPID sebagai sarana pengelolaan data dan keterbukaan informasi publik. Dari aspek sumber daya manusia, terdapat 1 orang PPID Utama dan 53 admin/operator data (PPID Pembantu) yang tersebar pada OPD sebagai pengelola data dan informasi. Namun demikian, staf teknis OPD menyatakan bahwa "pengelola data sudah menggunakan sistem digital, tetapi masih membutuhkan peningkatan kemampuan dalam pengoperasian sistem" (Staf Teknis OPD). Oleh karena itu, Diskominfo secara berkelanjutan melaksanakan pelatihan kepada pengelola data agar mampu mengoperasikan sistem secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur digital telah cukup baik, meskipun peningkatan kompetensi sumber daya manusia masih diperlukan untuk mendukung keberlanjutan transformasi digital.

Pada indikator transparansi dan keterbukaan data publik melalui platform digital, hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah mendorong peningkatan akses informasi publik serta memperkuat prinsip keterbukaan pemerintahan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang menyampaikan bahwa "data publik disediakan melalui portal Satu Data yang dapat diakses oleh masyarakat" (Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang). Kepala Bappeda Kota Palembang juga menjelaskan bahwa "keterbukaan data menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah" (Kepala Bappeda Kota Palembang). Sementara itu, perwakilan BPS Kota Palembang menegaskan bahwa "penyajian data harus tetap memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan data tertentu" (Perwakilan BPS Kota Palembang).

Hal ini diperkuat oleh data sekunder yang menunjukkan bahwa jumlah dataset yang tersedia pada Portal Satu Data meningkat dari 15 dataset pada tahun 2022 menjadi 42 dataset pada tahun 2025, sedangkan jumlah pengunjung portal meningkat dari 8.750 kunjungan pada tahun 2022 menjadi 25.336 kunjungan pada tahun 2025. Selain itu, capaian keterbukaan informasi publik Kota Palembang juga mengalami peningkatan yang konsisten, ditunjukkan oleh nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang meningkat dari 88,12 pada tahun 2022 menjadi 96,33 pada tahun 2025 sebagaimana tersaji pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.2

Indeks Keterbukaan Informasi Publik

No	Tahun	Nilai
1	2022	88,12
2	2023	90,45
3	2024	93,27
4	2025	96,33

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap data publik, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi Satu Data Kota Palembang telah mendukung prinsip open government melalui penyediaan informasi yang semakin terbuka, mudah diakses, dan berbasis teknologi digital.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dimensi digitalization dalam implementasi Satu Data Kota Palembang telah menunjukkan perkembangan yang positif melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data, dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, serta peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik berbasis digital. Temuan tersebut terlihat dari integrasi 42 dataset, keterhubungan 100% OPD dalam jaringan E-Government, dukungan 300 Mbps jaringan pemerintahan, keberadaan 53 operator data, peningkatan jumlah pengunjung portal hingga 25.336 kunjungan, serta capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar 96,33 pada tahun 2025.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Satu Data Kota Palembang dalam perspektif *Digital Age Governance* telah berjalan relatif baik pada dimensi *reintegration*, *needs-based holism*, dan digitalization. Secara umum, penyelenggaraan Satu Data telah mampu mendukung integrasi antarinstansi, penyederhanaan birokrasi berbasis kebutuhan pengguna, serta pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola data dan pelayanan publik. Namun demikian, masih ditemukan beberapa tantangan berupa belum meratanya ketersediaan dataset antar sektor, perlunya penguatan standar dan interoperabilitas data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi tata kelola data di Kota Palembang telah mengalami perkembangan yang positif, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi agar manfaat integrasi data dapat berjalan lebih optimal.

Apabila dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan penelitian ini pada dimensi *reintegration* mendukung penelitian Setiyawan et al. (2025) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Satu Data sangat dipengaruhi oleh komitmen antar lembaga, kejelasan pembagian peran, dan koordinasi lintas sektor. Hasil penelitian di Kota Palembang menunjukkan bahwa koordinasi antara Diskominfo, Bappeda, BPS, Disdukcapil, dan OPD telah berjalan melalui mekanisme forum Satu Data serta proses verifikasi dan standarisasi data. Temuan ini juga memperkuat penelitian Susniwati & Zamili (2022) yang menyatakan bahwa percepatan implementasi Satu Data membutuhkan kolaborasi kelembagaan yang kuat. Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan sebelumnya karena menunjukkan bahwa koordinasi tidak hanya dilakukan untuk pertukaran data, tetapi telah berkembang menjadi mekanisme integrasi data dalam satu portal yang digunakan bersama oleh berbagai instansi pemerintah daerah. Di sisi lain, temuan ini berbeda dengan penelitian Ridho & Jaelani (2025) di Kabupaten Kulon Progo yang menemukan bahwa koordinasi masih cenderung bersifat formalitas dan belum mampu menghasilkan integrasi

data yang optimal. Pada konteks Kota Palembang, koordinasi telah menghasilkan integrasi data yang lebih nyata, meskipun masih menghadapi kendala keterlambatan pembaruan data dan perbedaan standar antarinstansi.

Pada dimensi *needs-based holism*, hasil penelitian ini mendukung penelitian Anisa et al. (2023) yang menunjukkan bahwa tujuan utama penyelenggaraan Satu Data adalah menyediakan data yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik dan pengambilan keputusan. Temuan di Kota Palembang memperlihatkan bahwa integrasi data telah digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui layanan digital dan Mall Pelayanan Publik. Penelitian ini juga memperkuat argumentasi Susniwati & Zamili (2022) bahwa tata kelola data yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan. Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa implementasi Satu Data tidak hanya berfungsi sebagai instrumen koordinasi data, tetapi telah berkembang menjadi instrumen reformasi birokrasi yang memungkinkan pelayanan publik lebih cepat, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa manfaat Satu Data tidak berhenti pada aspek pengelolaan data, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

Pada dimensi digitalization, temuan penelitian ini mendukung penelitian Nuryana & Junaidi (2025) yang menegaskan bahwa infrastruktur digital dan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi Satu Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Palembang telah didukung oleh jaringan E-Government yang menjangkau seluruh OPD, keberadaan Command Center, Data Center, serta berbagai aplikasi dan portal digital yang mendukung pengelolaan data dan pelayanan publik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan kompetensi pengelola data masih menjadi kebutuhan yang penting, sehingga memperkuat temuan Nuryana & Junaidi (2025) mengenai pentingnya pengembangan kapasitas SDM. Selain itu, penelitian ini memperluas penelitian terdahulu dengan menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berkontribusi pada efisiensi pengelolaan data, tetapi juga mendorong peningkatan transparansi pemerintahan yang ditunjukkan melalui peningkatan jumlah dataset, jumlah pengunjung Portal Satu Data, serta peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kota Palembang dari 88,12 pada tahun 2022 menjadi 96,33 pada tahun 2025.

Kontribusi kebaruan penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan implementasi Satu Data melalui perspektif *Digital Age Governance* secara lebih komprehensif pada konteks pemerintah daerah metropolitan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menyoroti koordinasi, integrasi data, atau kapasitas sumber daya manusia secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Satu Data merupakan hasil keterkaitan antara integrasi kelembagaan, orientasi pelayanan berbasis kebutuhan, dan digitalisasi pemerintahan. Temuan tersebut memperkaya pengembangan teori *Digital Age Governance* dengan menunjukkan bahwa pada konteks kota metropolitan, keberhasilan transformasi tata kelola data tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam

mengintegrasikan aktor, layanan, dan data ke dalam satu ekosistem pemerintahan digital yang terhubung dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Satu Data Kota Palembang dalam perspektif *Digital Age Governance* secara umum telah berjalan dengan cukup baik melalui tiga dimensi utama, yaitu *reintegration*, *needs-based holism*, dan digitalization. Pada dimensi *reintegration*, pemerintah daerah telah membangun koordinasi, integrasi sistem informasi, dan kerja sama lintas sektor antara Diskominfo, Bappeda, BPS, Disdukcapil, serta berbagai OPD dalam penyelenggaraan Satu Data. Pada dimensi *needs-based holism*, implementasi Satu Data telah mendukung penyediaan data yang sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan masyarakat, penyederhanaan birokrasi melalui sistem data terpusat, serta peningkatan efisiensi pelayanan publik berbasis data terintegrasi. Sementara itu, pada dimensi digitalization, pemanfaatan teknologi digital telah diterapkan dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian data, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik melalui berbagai platform digital.

Namun demikian, implementasi Satu Data Kota Palembang masih menghadapi beberapa kendala, terutama belum optimalnya standarisasi dan sinkronisasi data antar-OPD, keterbatasan jumlah dataset pada beberapa sektor, serta masih perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem digital. Oleh karena itu, implementasi Satu Data perlu terus diperkuat melalui peningkatan interoperabilitas data, pengembangan kapasitas pengelola data, perluasan cakupan dataset sektoral, serta penguatan integrasi layanan dan platform digital agar tata kelola data pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung pengambilan kebijakan serta pelayanan publik di Kota Palembang.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu pelaksanaan penelitian yang relatif singkat, yaitu selama 20 hari, sehingga proses pengumpulan data dan pendalaman informasi dari seluruh aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Palembang belum dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas jangka panjang implementasi Satu Data Kota Palembang, khususnya terkait dampaknya terhadap kualitas perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan berbasis data, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam proses penelitian sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anisa, Z. L. N., Astuti, R. S., & Rahman, A. Z. (2023). Proses kolaborasi kebijakan Satu Data Salatiga dalam menyediakan informasi publik di Kota Salatiga. *Journal of Management and Public Policy, 12*(3), 896–913. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/40042

Daraba, D. (2019). *Inovasi pelayanan publik dan transformasi administrasi pemerintahan*. IPDN Press.

Dunleavy, P., & Margetts, H. (2023). Data science, artificial intelligence and the third wave of digital era governance. *Public Policy and Administration, 40*(2), 185–214. https://doi.org/10.1177/09520767231198737

Hanisch, M., Goldsby, C. M., Fabian, N. E., & Oehmichen, J. (2023). Digital governance: A conceptual framework and research agenda. *Journal of Business Research, 162*, 113777. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113777

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Metode penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Nuryana, & Junaidi. (2025). Implementasi kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Pemerintahan dan Politik, 10*(2), 356–383. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5266

Ravšelj, D., Umek, L., Todorovski, L., & Aristovnik, A. (2022). A review of digital era governance research in the first two decades: A bibliometric study. *Future Internet, 14*(5), 126. https://doi.org/10.3390/fi14050126

Ridho, M. R., & Jaelani, R. (2025). Collaborative governance dalam kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. *Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. https://eprints.ipdn.ac.id/21726/

Şahnagil, S. (2022). Data-based public administration as a developing actor of digital age governance. In *Proceedings of the 11th International Conference on Social Sciences*. Atatürk University. https://www.researchgate.net/publication/363469891_DATA-BASED_PUBLIC_ADMINISTRATION_AS_A_DEVELOPING_ACTOR_OF_DIGITAL_AGE_GOVERNANCE

Setiyawan, L. S., Yusrina, Mubarokah, S. A., & Asropi. (2025). Analysis of collaborative governance in the implementation of Satu Data Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 11*(1), 81–92. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2025.011.01.8

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: teoritik, legalistik, empirik, dan inovatif*. Alfabeta.

Susniwati, & Zamili, M. (2022). Acceleration of One Indonesian Data through collaborative governance in Indonesia. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 11*(2), 166–177. https://doi.org/10.31314/pjia.11.2.166-177.2022

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1956